

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Menurut Winwin Yadiati (2008:6) akuntansi didefinisikan suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada yang berkepentingan. dalam Pengertian Akuntansi menurut (Erlina, 2015:1) menjelaskan bahwa: secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu adalah informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan.

2. Akuntansi Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan segala sesuatu yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya Keuangan Negara sama keuangan daerah, hanya saja pada keuangan negara meliputi pengelolaan keuangan saja. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah. Dan juga ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah

dari pemerintahan pusat dan sekaligus melaporkan hasilnya secara transparan kepada publik.

Akuntansi Keuangan daerah adalah Tata buku atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu untuk menghasilkan informasi yang aktual dibidang keuangan. Seperti keuangan Negara, keuangan Daerah juga memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan Daerah yang dikelola langsung dan kekayaan Daerah dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan Daerah yang dapat dikelola langsung adalah APBD dan barang-barang inventaris milik Daerah, sedangkan keuangan Daerah yang dipisahkan adalah BUMD. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah perlu mengatur standar akuntansi pemerintah daerah agar dapat digunakan secara seragam di seluruh pemerintah daerah.

3. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Sedangkan menurut Abdul Hafiz Tanjung (2009:7) tujuan akuntansi keuangan Daerah adalah:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan kegiatan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

4. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serai pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Abdul Halim (2008;333).

Sedangkan menurut Indra Bastian (2009;151) Akuntansi Keuangan Daerah diartikan sebagai sistem yang mengelola semua transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah yang menghasilkan informasi keuangan dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu dapat diandalkan.

5. Perbedaan antara Akuntansi Keuangan Daerah dengan Akuntansi Perusahaan

Menurut Muhammed Gade (2010;28) menyebutkan perbedaan akuntansi keuangan daerah dengan akuntansi perusahaan atau swasta sebagai berikut:

- a) Perbedaan yang utama adalah terletak pada kegiatan-kegiatan pemerintahan pada umumnya tidak ditujukan untuk mencari laba sebagai halnya pada kegiatan-kegiatan perusahaan.
- b) Pemerintah memberikan pelayanan untuk kepentingan keamanan, kesejahteraan dan manfaat-manfaat umum lainnya kepada seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menjual barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan.
- c) Para penyumbang dana kepada pemerintah seperti wajib pajak tidak bertindak secara sukarela, mengharapkan agar dana yang diberikan diurus dengan efektif, efisien dan ekonomis sedangkan para pemberi modal pada perusahaan adalah secara sukarela untuk ikut dalam perniagaan yang mengharapkan suatu keuntungan atau laba.
- d) Akuntansi pemerintah bersifat kaku dengan banyaknya peraturan-peraturan yang mengaturnya, sedangkan akuntansi perusahaan bersifat *fleksibel*.
- e) Akuntansi pemerintah tidak menyusun perhitungan rugi dan laba seperti yang dilakukan pada akuntansi perusahaan.

- f) Akuntansi pemerintah tidak membuat tentang pemilikan pribadi seperti dibuat pada akuntansi perusahaan
- g) Pada Akuntansi pemerintah daerah tidak melaksanakan perkiraan penyusutan aktiva, sedangkan pada akuntansi perusahaan hal ini merupakan keharusan.
- h) Anggaran tahunan pemerintah merupakan rencana operasi keuangan yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif. Jumlah anggaran pemerintah tersebut merupakan batas maksimal yang wajib ditaati oleh pemerintah. Sedangkan pada perusahaan juga dibuat anggaran perusahaan tahunan dan dilaksanakan oleh direksi yang akan dipertanggungjawabkan dihadapan rapat umum pemegang saham.

6. Kedudukan Akuntansi Keuangan Daerah di Dalam Akuntansi

Menurut Sugianto, (1999) dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:38), Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu :

1. Akuntansi Komersial/Perusahaan
 Dalam akuntansi komersial, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditur dan pihak-pihaklain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.
2. Akuntansi Pemerintahan
 Dalam akuntansi pemerintah, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat.
3. Akuntansi Sosial
 Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam artian makro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah Neraca Pembayaran Negara, Rekening Arus Dana, Rekening Pendapatan dan Produksi Nasional, serta Neraca Nasional.

7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksud sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a) Basis Akuntansi

Pada umumnya basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

b) Nilai Historis

Aset dicatat berdasarkan pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada nilai yang lain karena lebih *objektif* dan dapat diverifikasi.

c) Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu tahun akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

d) Subtansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realisasi ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.

e) Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan keuangan perlu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f) Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g) Pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan lembar muka laporan keuangan.

h) Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

8. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

a. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul halim (2012:44) akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku saja. Dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. Double Entry

Sistem pencatatan double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh sebab itu, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah juga mencatat transaksi tersebut akan berefek pada sisi anggaran.

Entry artinya setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali pencatatan.

Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double*) dinamakan menjurnal, pencatatan harus menjaga persamaan dasar akuntansi, kedua sisi harus seimbang.

b. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan LO, dan beban, sebagaimana akan termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruhi oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:41) dasar akuntansi terbagi 4, yaitu:

1. Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut akan dicatat.

2. Basis AkruaI (Accrual Basis)

Basis akrual adalah suatu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban, pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada terjadinya transaksi dan beban dilaporkan pada saat beban tersebut diperlukan untuk menghasilkan pendapatan usaha.

Penerapan SAP berbasis akrual dengan penggunaan sistem pencatatan *double entry* melibatkan dua macam penjurnalan untuk setiap transaksi, yaitu ayat jurnal finansial (untuk pelaporan finansial) dan ayat jurnal anggaran (untuk pelaporan pelaksanaan anggaran). Ayat jurnal finansial dilaksanakan mirip dengan pencatatan yang dilakukan pada akuntansi sektor privat (akuntansi sektor bisnis), sedangkan ayat jurnal anggaran mencatat transaksi pendapatan-LRA dan belanja dengan akun SILPA sebagai pengganti akun kas. Pencatatan anggaran hanya ditujukan untuk menghasilkan pelaporan pelaksanaan anggaran saja yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Berdasarkan uraian tersebut contoh ayat jurnal finansial dan ayat jurnal anggaran yang dibuat adalah sebagai berikut :

- a. Ketika bendahara mengeluarkan SKPD menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) untuk pembayaran gaji pegawai.

Ayat jurnal finansial

Kas dibendahara pengeluaran SKPD		xxx
Rekening/Kas Pemda	xxx	

Ayat jurnal anggaran

Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja
(menerima SP2D LS dari kuasa BUD untuk membayar gaji pegawai)

Ayat jurnal finansial

Beban gaji & tunjangan pegawai	xxx	
Kas dibendahara pengeluaran SKPD		xxx

Ayat jurnal anggaran

Belanja gaji & tunjangan pegawai	xxx	
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) (membayar gaji pegawai)	xxx	

- b. Ketika bendahara penerima SKPD menerima uang tunai dari pendapatan retribusi dan menyetor ke kas daerah.

Ayat jurnal finansial

Rekening/Kas Pemda	xxx	
Kas dibendahara penerimaan SKPD		xxx

Jurnal anggaran

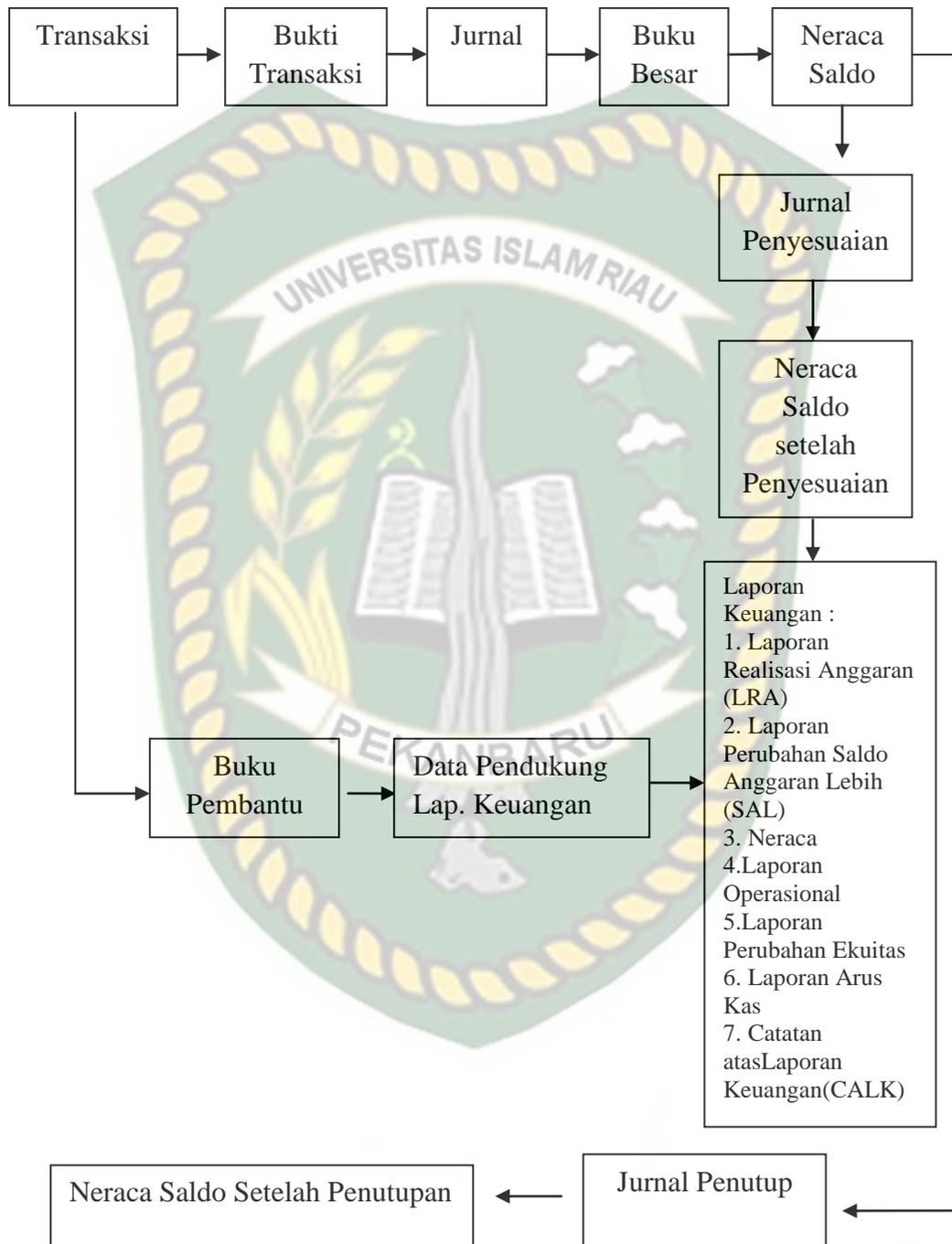
Tidak ada jurnal anggaran karena bukan merupakan transaksi pendapatan atau belanja
(menyetorkan uang retribusi ke kas daerah)

3. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis)
Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
4. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis)
Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan.

9. Siklus Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem-subsistem, atau kesatuan-kesatuan yang lebih kecil, yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan mempunyai tujuan tertentu. Satu sistem mengelola input menjadi output. Sistem dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi, karena siklus akuntansi merupakan sistematisasi pencatatan transaksi keuangan, peringkasan dan pelaporan keuangan. Informasi berupa laporan keuangan dihasilkan melalui proses akuntansi yang panjang. Pada proses tersebut terdapat tahap-tahap yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil laporan yang baik, valid dan akuntabel. Tahap-tahap itulah yang kemudian disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses penyusunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Prinsip-prinsip dan kaidah akuntansi, prosedur, metode-metode serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dicatat dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan.

Gambar 1
Siklus Akuntansi



Sumber: Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto.

Berdasarkan Gambar diatas transaksi-transaksi dalam siklus akuntansi yang terdiri dari:

a. Transaksi

Yaitu kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya dengan buku/bukti/dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.

b. Bukti Transaksi

Transaksi yang terjadi pertama-tama akan direkam dalam formulir sehingga formulir tersebut merupakan bukti. Formulir-formulir ini dibagi menjadi formulir internal yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir eksternal yaitu formulir-formulir yang akan diterima dari luar organisasi

c. Jurnal

Jurnal merupakan media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis (urut waktu). Jurnal disebut juga sebagai buku harian karena fungsi jurnal digunakan untuk melakukan pencatatan pertama dari transaksi-transaksi. Dalam jurnal transaksi keuangan diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Untuk aktiva dibuat jurnal Corollary yaitu jurnal yang dibuat saat perolehan aktiva tetap.

d. Posting ke Buku Besar

Setelah dilakukan jurnal kemudian jumlah yang terdapat pada sisi debit dan kredit dipindahkan/ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan transfer ini disebut *posting*. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan rekening, bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang dan ekuitas dana.

e. Buku Besar Pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar. Rekening buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas (*controlling accounts*) sedangkan rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu (*subsidiary accounts*). Contoh buku pembantu adalah buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan, dan sebagainya.

f. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya pada suatu periode tertentu. Menurut Sofyan Safry Harahap (2007:6) neraca adalah posisi keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dalam suatu tanggal tertentu atau *a moment of time*.

g. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian perlu dibuat karena dalam akuntansi dikenal *prosedur penyesuaian*. Prosedur penyesuaian perlu dilakukan karena akuntansi didasari asumsi dasar bahwa suatu umur entitas ekonomi dapat di penggal-penggal menjadi periode-periode yang sifatnya buatan. Asumsi ini disebut *asumsi periodisasi* yang mengharuskan kita untuk membuat jurnal penyesuaian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Jurnal penyesuaian dibuat untuk tujuan berikut:

- a) Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi
- b) Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi

- c) Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca, sebagian nilai aktiva pada awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan
- d) Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca. Dalam hal ini pembiayaan sebenarnya sudah terjadi, tetapi belum dibayar.

h. Neraca saldo setelah penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah mempostingnya ke rekening buku besar yang berhubungan. Setelah dilakukan posting prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian. Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya jurnal penutup, rekening yang tetap ada adalah rekening permanen yaitu asset, hutang dan ekuitas dana.

Untuk menihilkan rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan digunakan rumus sebagai berikut:

- a. Karena pendapatan terletak pada sisi kredit maka untuk menihilkannya harus didebit, demikian halnya penerimaan pembiayaan.
- b. Karena belanja terletak disisi debit maka untuk menihilkannya harus dikredit, demikian halnya pengeluaran pembiayaan.
- c. Selisih antara pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja dan pengeluaran pembiayaan merupakan silpa.
- d. Karena APBD kita menganut surplus dan defisit maka posisi silpa kemungkinan debit dan kemungkinan kredit.

Berdasarkan rumus tersebut contoh jurnal penutup yang dibuat adalah sebagai berikut:

Pendapatan	xxx	
Penerimaan Pembiayaan	xxx	
Silpa	xxx	
Belanja		xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx	
Silpa		xxx

i. Laporan Keuangan

Tahapan Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Sesuai PSAP No.1 paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Berdasarkan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 63 dinyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Pada Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Pada Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atas ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara

lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

6. Laporan Arus Kas

Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 80-81 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/daerah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

j. Jurnal Penutup

Rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan disebut rekening temporer (nominal). Disebut temporer karena saldo kedua rekening tersebut pada akhir periode akuntansi akan ditransfer ke dalam rekening Ekuitas Dana atau R/K Pemda tersebut adalah menutup rekening temporer. Proses ini disebut dengan penutupan rekening temporer.

k. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Tahap akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan berisi saldo rekening-rekening setelah jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya rekening-rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan sub-bagian dari rekening ekuitas dana, sehingga pada akhir periode akuntansi atau akhir tahun anggaran saldo-saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas.

Rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan disebut rekening temporer (nominal) sedangkan rekening asset, hutang dan ekuitas dana disebut rekening permanen (*real*) karena saldo rekening temporer dalam hal ini pendapatan, belanja dan pembiayaan tidak berlanjut pada tahun berikutnya maka angka-angka rekening tersebut harus dihilangkan melalui jurnal penutup (Abdul Halim,2008:56).

10. Elemen- elemen Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:44) yang menunjukkan adanya akuntansi keuangan daerah terdapat beberapa elemen-elemen sistem akuntansi keuangan daerah yang diantaranya sebagai berikut :

a. Transaksi

Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, dokumen atau buku pendukung dalam kegiatan operasi entitas, transaksi dilakukan oleh masing-masing pemegang kas bendahara.

b. Jurnal

Buku jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (urut waktu) yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data lainnya.

c. Buku Besar

Buku besar merupakan suatu buku yang berisi kesimpulan rekening atau perkiraan yang telah dicatat di dalam jurnal.

d. Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertai pada suatu periode tertentu.

e. Jurnal Penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode anggaran atau pada saat laporan keuangan akan disusun agar menghasilkan keterkaitan yang tepat antara pendapatan dan belanja.

Jurnal penyesuaian disusun bertujuan sebagai berikut:

1. Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
2. Melaporkan semua belanja yang terjadi selama periode akuntansi.
3. Melaporkan dengan akurat nilai aktiva pada tanggal neraca. Sebagai nilai aktiva pada awal terpakai selama satu periode akuntansi.
4. Melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca.

f. Jurnal Penutup

Jurnal Penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup rekening pendapatan dan belanja pada akhir periode akuntansi akan ditransfer ke dalam rekening Koran PPKD sebagai rekening modal yaitu menutup rekening temporer.

g. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu.

Tahapan-tahapan penyajian laporan keuangan daerah meliputi:

1. Laporan realisasi Anggaran

Laporan yang berisikan Ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur pendapatan, belanja, transfer, *Surplus/deficit*, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (PP 71 Tahun 2010).

2. Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/LO

Laporan yang berisikan Ikhtisar secara ringkas dan lengkap terhadap pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD (PP 71 Tahun 2010).

3. Neraca

Laporan yang berisikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP 71 Tahun 2010).

4. Daftar Penyetoran Sisa/LPSAL

Laporan yang berisikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SLPA/SKPA, koreksi dan SAL akhir (PP 71 Tahun 2010)

5. Laporan Arus Kas

Laporan yang berisikan aliran masuk dan keluar uang (kas) yang berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya (PP 71 Tahun 2010)

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan yang berisikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, *surplus/deficit-LO*, koreksi dan ekuitas akhir (PP 71 Tahun 2010).

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan yang berisikan rincian mengenai informasi tentang penjelasan atau daftar terinci analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, DPS/LPSAL, LO, LAK, dan LPE.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) merupakan serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang dapat dilakukan

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi selain aset.

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas adalah meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi penerimaan kas, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaan kas tersebut.
- c. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain:
 - 1) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
 - 2) Surat Tanda Setoran (STS)
 - 3) Bukti Transfer
 - 4) Nota Kredit

- d. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
- e. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
- f. Pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, buku besar dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- g. Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau SKPKD.

Prosedur akuntansi penerimaan kas, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilakukan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

- b. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, disertai rekening-lawan asal pengeluaran kas tersebut.
- c. Bukti transaksi pengeluaran kas mencakup antara lain:
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - 2) Bukti Transfer
 - 3) Nota Kredit
 - 4) Bukti Pengeluaran Lainnya
- d. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar.
- e. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
- f. Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- g. Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/atau kejadian keuangan selainkas pada SKPD dan/atau SKPKD.

Prosedur akuntansi selain kas, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- b. Transaksi dan/atau kejadian selain kas, antara lain:
 - 1) Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana
 - 2) Koreksi kesalahan pencatatan
 - 3) Penerimaan Hibah/donasi selain kas
 - 4) Pembelian secara kredit
 - 5) Retur pembelian kredit
 - 6) Pelepasan hak atas aset/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas
 - 7) Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas
- c. Bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas, antara lain:
 - 1) Berita acara penerimaan barang
 - 2) Surat keputusan penghapusan barang
 - 3) Surat pengiriman barang
 - 4) Surat keputusan mutasi barang
 - 5) Berita acara pemusnahan barang
 - 6) Berita acara serah terima barang
 - 7) Berita acara penilaian

- d. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
- e. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPD berdasarkan bukti memorial memvotat ke dalam buku jurnal umum.
- f. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
- g. Jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.

4. Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi aset perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitasi, penghapusan, pemindah tangan, perolehan klarifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.

Prosedur akuntansi aset, yaitu sebagai berikut:

- a. Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, pengurus dan penyimpan barang. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

b. Bukti transaksi dan/atau kejadian akuntansi aset terdiri dari:

- 1) Bukti acara penerimaan barang
- 2) Surat keputusan penghapusan barang
- 3) Surat penerimaan barang
- 4) Surat keputusan mutasi barang
- 5) Berita acara pemusnahan barang
- 6) Berita acara serah terima barang
- 7) Berita acara penilaian
- 8) Berita acara penyelesaian pekerjaan

- c. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.
- d. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal umum.
- e. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
- f. Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasikan atas hasilnya. Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

Didalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah pada BAB 1 ketentuan umum pasal 1 ayat 8 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang masuk laporan Finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber

daya. Komponen Laporan Keuangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum Negara atau bendahara umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara atau Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos seperti saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, korelasi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain, saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas

d. Laporan Operasional

Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos seperti beban dari kegiatan operasional, pendapatan-LO dari kegiatan

operasional, surplus / defisit dari kegiatan non operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, surplus / defisit-LO.

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, intervestasi, pendanaan, dan transitoris.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan pos-pos seperti ekuitas awal, Suplus/defisit-LO pada priode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk ditetapkan atas transaksi-transaksi dan kebijakan-kebijakan penting lainnya
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

13. Akuntansi Pada Rumah Sakit

Akuntansi Rumah Sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran pertama yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer Rumah Sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan Rumah Sakit. Yang menjadi kendala pada Rumah Sakit Swadana dan belum terpecahkan sampai saat ini adalah Rumah Sakit melakukan dua sistem pencatatan dan pelaporan yaitu yang berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim (*Accrual Basis*) dan Basis Kas (*Cash Basis*) untuk memenuhi

ketentuan yang berlaku yang diharapkan dapat berjalan secara paralel, independen dan tercipta mekanisme saling kontrol di antaranya (kontrol internal), namun dirasakan menjadi beban petugas Rumah Sakit.

Rumah Sakit Pemerintah merupakan unit kerja dari Instansi Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Di samping itu Rumah Sakit sebagai unit sosial dihadapkan pada semakin langkanya sumber dana untuk membiayai kebutuhannya, padahal di lain pihak Rumah Sakit diharapkan dapat bekerja dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan perubahan sistem keuangan Rumah Sakit serta sistem keuangan Pemerintah secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh Rumah Sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta persiapan Badan Layanan Umum dari tahun ke tahun. Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, tetapi juga membuka peluang untuk timbulnya eksekusi negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara.

Aplikasi akuntansi dana juga dapat kita lihat dalam praktik akuntansi di rumah sakit. Namun, harus disadari bahwa tidak semua rumah sakit adalah organisasi yang bersifat nirlaba. Beberapa rumah sakit dioperasikan sebagai layaknya perusahaan yang mencari laba, bahkan beberapa diantaranya melakukan penjualan sahamnya di pasar modal. Dalam kasus rumah sakit yang berorientasi laba, standar akuntansi yang diikuti adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk sektor komersial. Pelanggan baik eksternal maupun internal mempunyai keinginan- keinginan ataupun harapan terhadap jasa yang disediakan

oleh rumah sakit. Mereka mempunyai persyaratan-persyaratan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh rumah sakit.

Pemerintah Daerah yang telah menjadi BLU/BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan. Dalam hal rumah sakit pemerintah di daerah (RSUD) maka standar pelayanan minimal ditetapkan oleh kepala daerah dengan peraturan kepala daerah.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil. Didalam Peraturan Menteri pada pasal 1 ayat 4 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b memuat pilihan prosedur

dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting keadaan buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

15. Laporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba Menurut PSAK N0.45

PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba non pemerintah. Dalam PSAK karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama (aset), penyumbang bukan pemilik entitas dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial.

Entitas nirlaba juga dapat berutang dan memungkinkan pendapatan dari jasa yang diberikan kepada publik, walaupun pendapatannya tidak dimaksud untuk memperoleh laba. Dengan demikian, entitas nirlaba tidak pernah membagi laba dalam bentuk apapun kepada pendiri/pemilik entitas. Laporan keuangan entitas nirlaba bertugas mengukur jasa atau manfaat entitas dan menjadi saranapertanggungjawaban pengelola entitas dalam bentuk pertanggungjawaban harta- utang (neraca), pertanggungjawaban kas (Arus Kas), dan Laporan Aktivitas.

Begitu pentingnya donatur sehingga sumbangan bukan kas perlu dipaparkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), sistem akuntansi harus menghasilkan informasi akuntansi yang akan didistribusikan kepada para pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi disebut juga laporan keuangan.

Menurut prof. Dr. Zaki Baridwan (2009) Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Pembatasan Permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi nirlaba diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- b. Pembatasan Temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.
- c. Sumbangan Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
- d. Sumbangan Tidak Terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

Di dalam menyusun sebuah laporan keuangan sudah diatur karenanya laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK no. 45 ada 4 macam yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan

mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah dari pembatasan permanen atau temporer diungkapkan dengan cara menyajikan jumlah tersebut dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode. Perubahan aktiva bersih dalam laporan aktivitas tercermin pada aktiva bersih atau ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian.

Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambahan aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambahan aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat

disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi.

Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambahan aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas meliputi jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive.

b. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta telaah pustaka yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Kabupaten Pelalawan di duga belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah”.